

ABSTRAK

Perhutanan sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat atas pengelolaan kawasan hutan. Namun, keberhasilan implementasinya tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat desa yang masih tertinggal dalam memenuhi kesejahteraannya, sebagaimana yang diidentifikasi oleh Robert Chambers melalui konsep perangkap kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program perhutanan sosial di Desa Teluk Bakung dengan menggunakan kerangka teori tersebut sebagai alat analisis utama. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur, menggunakan dokumen-dokumen hasil kerja perhutanan sosial yang dimiliki oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Teluk bakung, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), dan lembaga pendamping SAMPAN Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga program perhutanan sosial, yakni kelola lembaga, kelola kawasan, dan kelola usaha, secara bersama-sama berhasil memutus sejumlah mata rantai perangkap kemiskinan yang dialami masyarakat desa. Program kelola usaha khususnya telah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, melatih dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perhutanan sosial dengan lebih akuntabel, sementara pengelolaan Hutan Desa Teluk Bakung menghasilkan manfaat berupa sumber daya alam yang terjaga, berkembang dan lestari untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelola usaha membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses sumber daya alam hutan bukan kayu untuk diolah dan dijadikan sumber pendapatan baru yang inovatif sebagai hasil hutan olahan bukan kayu. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pola kerjasama multiusaha yang melibatkan pemerintah, pendamping lapangan, dan sektor swasta secara sinergis dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan perhutanan sosial yang didukung oleh kemitraan lintas sektor mampu menjadi instrumen transformatif dalam mengatasi kemiskinan masyarakat desa hutan secara berkelanjutan.

Kata kunci: perhutanan sosial, hutan desa, perangkap kemiskinan, kelola lembaga, kelola kawasan, kelola usaha, Desa Teluk Bakung, kemitraan multiusaha.

ABSTRACT

Social forestry is a strategic policy of the Indonesian government aimed at providing local communities with legal access to the management of forest areas. However, the success of its implementation cannot be separated from the condition of village communities that remain disadvantaged in fulfilling their welfare, as identified by Robert Chambers through the concept of the deprivation trap. This study aims to analyze the implementation of the social forestry program in Teluk Bakung Village using this theoretical framework as the primary analytical tool. The research was conducted through a literature study approach, utilizing working documents produced by the social forestry program held by the Village Forest Management Institution (*Lembaga Pengelola Hutan Desa/LPHD*) of Teluk Bakung, the Forest Management Unit (*Kesatuan Pengelola Hutan/KPH*), and the facilitation organization SAMPAN Kalimantan. The findings indicate that the three pillars of the social forestry program — institutional management, area management, and business management — collectively succeeded in breaking several chains of the deprivation trap experienced by the village community. The business management program in particular has opened new employment opportunities for the community, trained and developed community capacity in managing social forestry in a more accountable manner, while the management of the Teluk Bakung Village Forest has yielded benefits in the form of preserved, developing, and sustainable natural resources that maintain ecological balance and contribute to improving community welfare. Business management has also opened access for communities to harvest non-timber forest products, which are processed and transformed into innovative new sources of income as value-added non-timber forest products. These achievements are inseparable from a multi-stakeholder cooperative model involving the government, field facilitators, and the private sector in a synergistic and sustainable manner. This study concludes that a social forestry approach supported by cross-sectoral partnership can serve as a transformative instrument in sustainably addressing poverty among forest-dependent village communities.

Keywords: social forestry, village forest, deprivation trap, institutional management, area management, business management, Teluk Bakung Village, multi-stakeholder partnership